

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, I. S. (2009). Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media. Agasi.
- A. P. (2020). Sestrategi Pemberantasan Korupsi . Jawa Tengah : Pustaka Rumah Cinta.
- Ali, M. (2013). Teori, dan Praktik Hukum Pidana Korupsi. Yogyakarta: UII PERS.
- Atmadja, A. S. (2009). Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2004). Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: CV Mandar Maju.
- Chazawi, A. (2017). Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Desmawati, R. (2020). Dinamika Korupsi Di Indonesia . Jawa Tengah : Pustaka Rumah Cinta.
- Dr. Joko Cahyono. S.H., M. (2025). Dinamikan Hukum Korupsi Di Indonesia . Jawa Tengah : CV. Sernu Untung.
- Effendy, M. (2010). Pemberantasan Korupsi dan Good Governance. Jakarta: Timpani Publishing.
- G. R. (2019). Legal Philosophy. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (2020). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indrati, M. F. (2020). Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: OT Kanisius.
- Makawimbang, H. F. (2014). Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Thafa Media.
- Marzuki, P. M. (2015). PENELITIAN HUKUM. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. 2021. Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif. Jakarta: Kencana.
- Oktaviani, A. T. (2020). Korupsi Yang Membudidaya Di Indonesia . Jawa Tengah :Pustaka Rumah Cinta.
- MD, M. M. (1998). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putra, I. G. A. 2021. Hukum Waris Adat di Bali: Kajian Sistem Patrilineal dan Matrilineal. Denpasar: Udayana University Press.
- Romansyah, A. (2020). Upaya Pencegahan Korupsi . Jawa Tengah : Pustka Rumah Cinta.
- Silviana, A. (2025). Pendidikan Anti Korupsi. Padang: CV. Gita Lentera.
- Sutedi, A. (2010). Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulianti, S. 2020. Kesetaraan Gender dalam Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Rajawali

Artikel dalam Jurnal

- Amtiran, P. Y. (2020). Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Of Management*, Vol 12 Nomor 2. Hal 6.
- Andries, C. G. (2026). Analisis Pertimbangan Hakim atas Unsur-Unsur Kerugian Negara: Studi atas Putusan Nomor: 78/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Jkt.Pst. Vol. 6 NO. 2 (2026) *JURNAL HUKUM BACARITA*, 268-280.
- Ardika, I. W. (2021). Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa dalam perspektif hukum desa adat di Bali. *Udayana Master Law Journal (Jurnal Magister Hukum Udayana)*, 10(2), 256–270.
- Ardika, I. W. (2021). Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa dalam perspektif hukum desa adat di Bali. *Udayana Master Law Journal (Jurnal Magister Hukum Udayana)*, 10(2), 256–270.
- Azmi, A. F. (2024). Dampak Dan Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Perguruan Tinggi . *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* , 5. Vol 1 Nomor 3. Hal 8.
- Bohalima, I. S. (2022). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMJATUHAN HUKUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TOK/2021/PN Bdg). VOL 1. NO. 2 (2022): *JURNAL PANAH HUKUM*, 1. 111-121.
- Darmadi, A. O., & Nadia, K. D. (2025). PENENTUAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PENGKREDITAN DESA (LPD) DI BALI. *Jurnal Kerta Wicara* Vol. 15 No. 7 Tahun 2025 hlm. 427-439, 15, 427-439.
- Einstein, T. (2020). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan. *National Journal of Law*, Vol 3 Nomor 2, Hal 3-4.
- Fatkhurohman, & K. N. (2017). Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, 14.
- Fatkhurohman, & Kurniawan, M. B. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 507–528.
- Fatkhurohman, F., & Kurniawan, N. (2017). Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, 14, 3-21.
- Firmansyah, R. A. (2020). Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurist-Diction* Vol.3 (2) 2020, 3, 671-685.
- Hartanto. (2022). Eksistensi Pengaturan Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Korupsi. *Cabkim*, Vol 18 Nomor 2, Hal 4.
- Jaya, P. K., Suhartana, L. W., & Wisudawan, I. A. (2021). PENGATURAN DAN KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PENGKREDITAN DESA DI INDONESIA. Vol. 1 No. 1 (2021): *Commerce Law*, 1, 114-118.

- Kumara Jaya, P. K., Pria Suhartana, L. W., & Wisudawan, I. A. (2021). PENGATURAN DAN KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PENGKREDITAN DI INDONESIA. Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law, 1, 114-118.
- M. A. (2014). Hubungan Antara Sumber dan Metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Penetapan Uang Pengganti. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 21 JANUARI 2014: 43-60, 21, 43-60.
- M. N. N, D. U., & R. R. (2024). Tinjauan Yuridis Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi . Justicia Journal, 13.
- Nadila, K. D., & Darmadi, A. N. (2025). PENENTUAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PENGKREDITAN DESA (LPD) DI BALI. Jurnal Kertha Wicara Vol. 15 No. 7 (2025) hlm 427-439, 15, 427-439.
- Narayana, N. R., & Sarjana, I. M. (2022). TANGGUNG JAWAB LPD TERKAIT DENGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURU LPD. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 5 Tahun 2022, hlm. 1148-1158, 10, 1151-1158.
- Nirmala, M. D., & Purwanti, N. P. (2019). STATUS LEMBAGA PENGKREDITAN DESA SEBAGAI INSTITUSI KEUANGAN DESA ADAT. Rumah Arsip Vol. 6 No. 5 (2019), 6, 1-15.
- Nugroho, M. N. N., & Romlan. (2024). Formulasi unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 54(1), 1–21.
- Putra, H. C. (2022). Konsep Pengelolaan Keuangan Negara Dan Barang - Barang Publik. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan, Vol 2 Nomor 2. Hal 8.
- Putra, I. M., & Sudarma, I. K. (2019). Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa sebagai lembaga keuangan berbasis hukum adat di Bali. Kertha Patrika: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 41(2), 132–145.
- Putri, K. S. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Pengkreditan Desa. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, Vol 9 Nomor 1. Hal 6-7.
- Putri, K. S., & Raka, A. A. (2021). IMPLEMENTASI PERATURAN PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENGKREDITAN DESA (LPD) (Study Penelitian Pada LPD Desa Pakraman Sesetan). VOL.9 NO.1 (2021): WIDYA PUBLIKA, 9, 1-103.
- Saifuddin, B. (2017). Dampak Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Warta, 3-4
- Santoso, J. (2023). Dampak Korupsi Dalam Bentuk Pelanggaran Hukum Terhadap Hukum Dekalog Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia . Journal of Biblical Practice , 14. Vol 3 Nomor 1, Hal 14
- Shofiyah, M. (2023). Dampak Korupsi Bagi Masyarakat Dan Dalam Perspektif

Hukum Islam. Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist ,8. Vol 6 Nomor 1. Hal 6

Syarbaini, A. (2024). Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam . Jurnal Tahqiq, 4. Vol 18 Nomor 1. Hal 4

Syifa Azzahra, I. A. (2025). Analisis UU Tipikor dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, Vol 3 Nomor 2, Hal 4.

W, M. I. (2023). ANALISIS HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIA . Jurnal IKAMAKUM , Vol 3 Nomor 1, Hal 3-4.

Wardhani, N. W., & Sugama, I. G. (2025). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PENGKREDITAN DESA (LPD). VOL.3 NO. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK EDISI OKTOBER, 3, 26-40.

Wibowo, A. (2021). Kepastian hukum unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(2), 221–238.

Wisudawan, I. A., Suhartana, L. W., & Kumara Jaya, P. K. (2021). PENGATURAN DAN KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PENGKREDITAN DESA DI INDONESIA. Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law, 1, 114-118.

Artikel dalam internet

Buleleng, R. k. (2020, Desember 30). Hukum dan kriminal . Retrieved from Koran Buleleng: <https://koranbuleleng.com/2020/12/30/terjerat-kasus-korupsi-ketua-lpd-kalianget-tersangka/> (Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2024)

Olivia. (2021, November 9). detikcom. Retrieved from detikedu: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-cara-memberantasnya#google_vignette (Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2024)

Skripsi Atau Tesis.

Ihsan Asmar. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Sinjai. (Tesis). Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar.

Nufaizy. R. M. 2022. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Yang Di Lakukan Aparatur Sipil Negara. (Tesis). Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin Makasar.

Widia Arlinda. 2022. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan

Modus Manipulasi Data Dokumen. (Skripsi). Universitas Hasanuddin Makasar.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Yang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 21 November 2002, Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 17 Oktober 2019, Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Tahun 2019 Nomor 6409.

Peraturan Provinsi Bali (Perda) No 3 Thn 2017 Tentang Lembaga Pengkreditan Desa (LPD). (Ditetapkan 2017 Lembaran Daerah Prov. Bali Tahun 2017 No. 3).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286.

